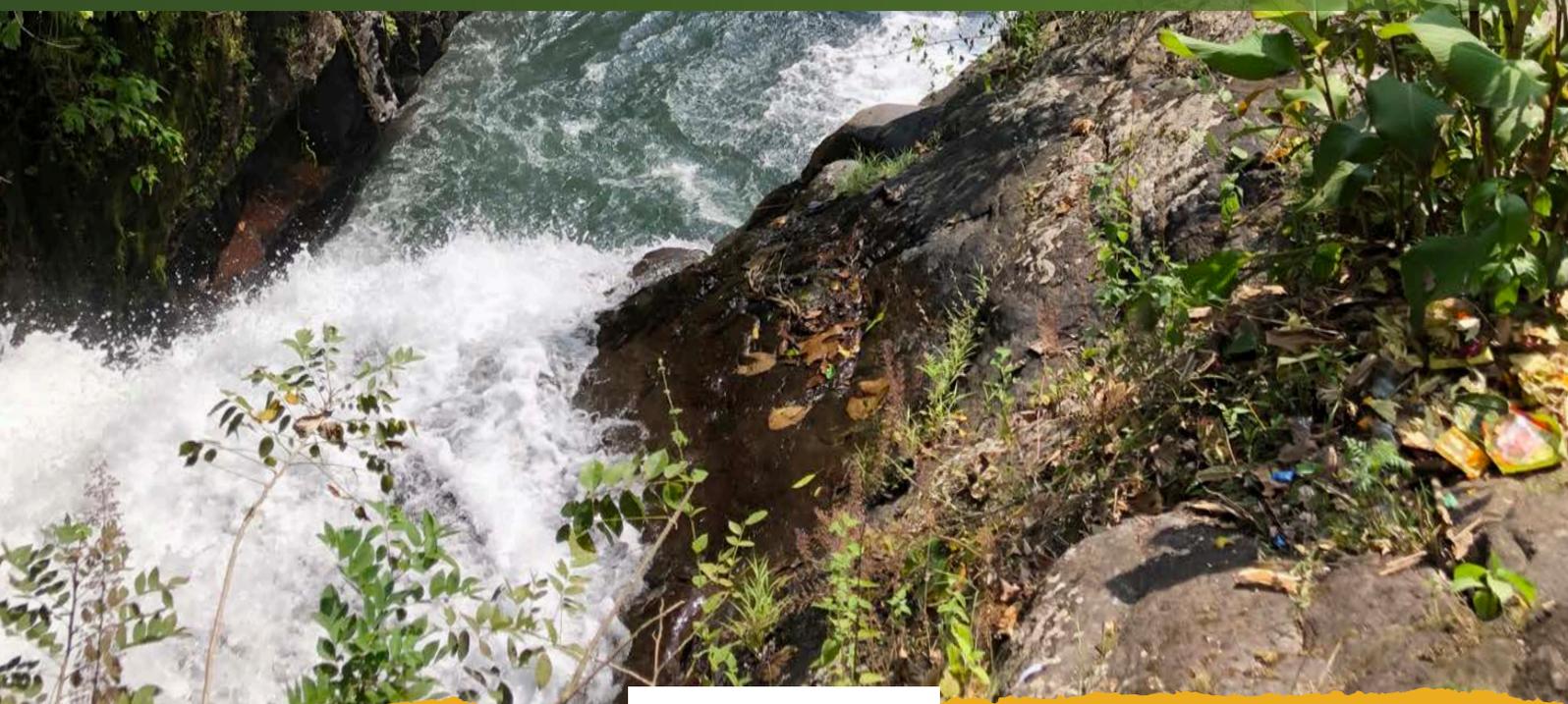


# MEREGULASI KEUANGAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI

Penilaian untuk Global Biodiversity Framework

Ringkasan Eksekutif



# Ringkasan eksekutif

Aliran keuangan publik dan swasta yang secara langsung berkontribusi terhadap hilangnya sumber daya alam global diperkirakan mencapai 7 triliun Dolar AS pada tahun 2023, sedangkan yang digelontorkan untuk melestarikan atau memulihkan keanekaragaman hayati hanya 200 miliar Dolar AS. Memperkenalkan regulasi yang dapat menghapus aliran dana yang mendorong deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait harus menjadi prasyarat bagi keberhasilan intervensi konservasi.

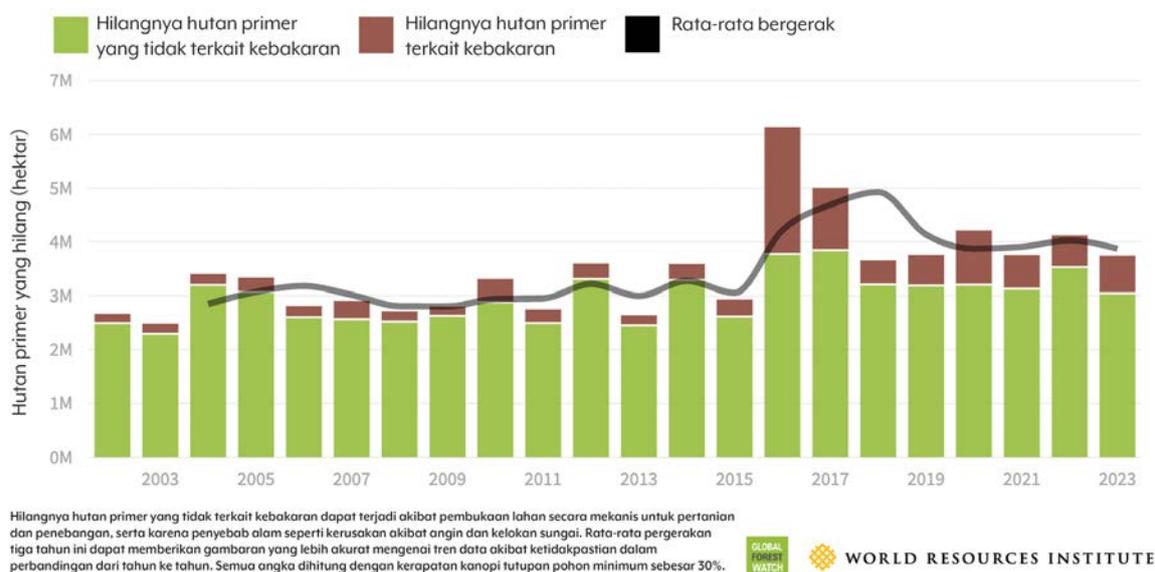
Penelitian terbaru yang dilakukan Koalisi Forests & Finance mengkaji kecukupan regulasi sektor keuangan di lima negara dan wilayah -- Indonesia, Brasil, Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat -- dalam kaitannya dengan perlindungan keanekaragaman hayati, dengan fokus pada hutan tropis. Kelima wilayah yurisdiksi tersebut merupakan beberapa wilayah yang paling penting bagi keuangan dan investasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati tropis dan pelanggaran hak-hak di seluruh dunia, yang mencakup sebagian besar aliran keuangan yang dilaporkan dalam laporan terbaru Membiayai Penghancuran Keanekaragaman Hayati.

Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (*Global Biodiversity Framework*/GBF) merupakan kesepakatan penting yang dicapai pada Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022, yang ditandatangani oleh 196 negara. GBF bertujuan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati yang hilang dan memulihkan alam, sebagaimana ditetapkan dalam 4 tujuan untuk tahun 2050 dan 23 target untuk tahun 2030. Laporan ini menilai kekuatan dan kesenjangan dalam regulasi sektor keuangan yang ada saat ini terhadap beberapa target GBF 2030, dengan mengacu pada deforestasi yang berkaitan dengan sektor keuangan di setiap wilayah yurisdiksi yang dinilai.

Laporan ini menemukan bahwa meskipun ada beberapa tanda reformasi sektor keuangan yang positif di beberapa wilayah yurisdiksi, regulasi yang ada umumnya belum memadai untuk mencegah sektor keuangan agar tidak mendukung ekstraksi sumber daya dari bioma hutan tropis secara eksploitatif. Laporan ini mendesak penerapan regulasi dan kebijakan pengawasan kuat sektor keuangan yang berorientasi hasil, serta skema sanksi yang jelas atas ketidakpatuhan.

Meskipun tidak secara langsung dibahas dalam laporan ini, insentif ekonomi dasar yang berfungsi untuk mengendalikan ekonomi ekstraktif global juga harus ditindaklanjuti. Masalah yang paling utama yakni isu-isu seperti pembayaran utang yang tidak berkelanjutan, persyaratan ekonomi terkait, dan ketentuan perjanjian perdagangan tertentu. Diharapkan bahwa perombakan regulasi sektor keuangan dalam mendukung langsung pencapaian tujuan kebijakan publik terkait keanekaragaman hayati juga dapat mendukung upaya-upaya untuk menghadapi tantangan struktural yang lebih luas ini.

## Hutan primer tropis yang hilang, 2002-2023 (SUMBER: WORLD RESOURCES INSTITUTE)



# Deforestasi dan pelanggaran hak terus berlanjut secara global

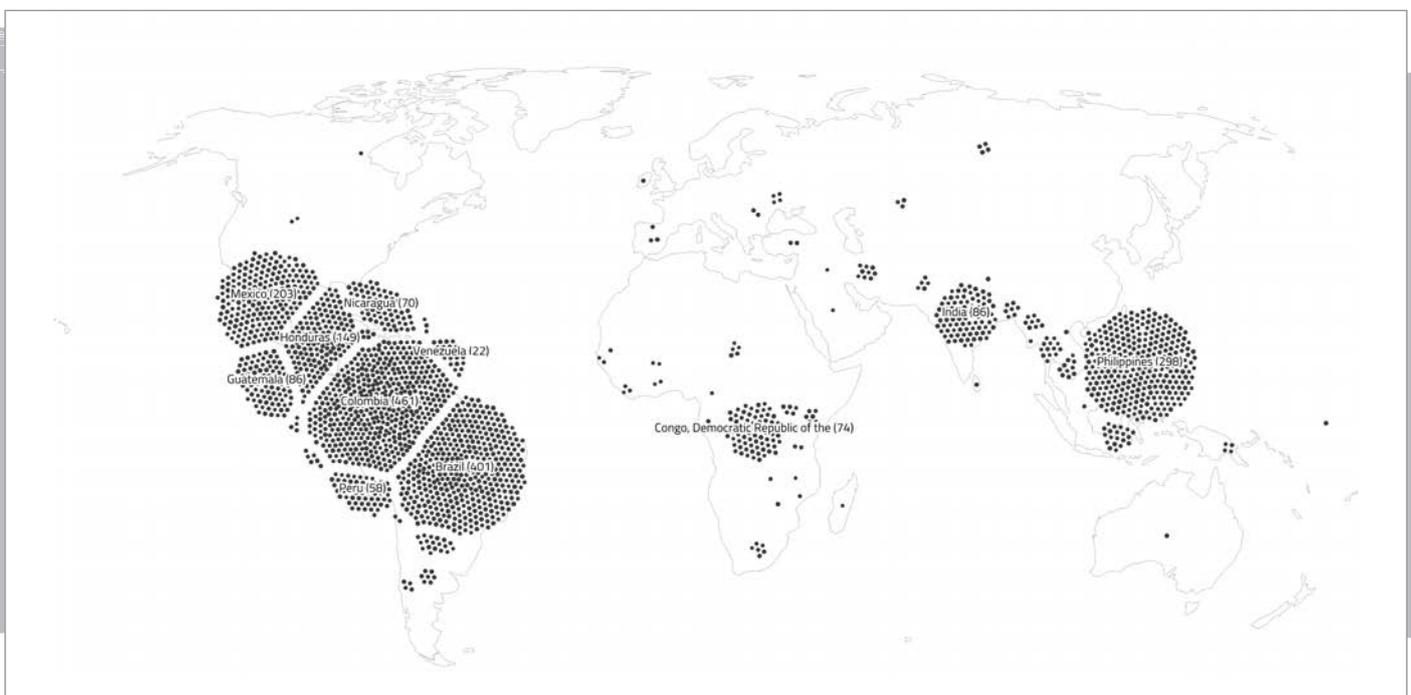
Semua kehidupan di Bumi bergantung pada hutan. Mulai dari siklus air, udara bersih, hingga menjaga kestabilan suhu global, hutan secara langsung memengaruhi kesejahteraan seluruh kehidupan di planet ini. Terlebih lagi, hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem yang paling kaya akan keanekaragaman hayati di Bumi, yang menjadi habitat bagi lebih dari setengah spesies vertebrata dunia. Demi keberlangsungan hidup semua makhluk di Bumi, sangat penting untuk menghentikan berbagai krisis yang sedang berlangsung dan saling berkelindan: perubahan iklim, kemiskinan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kekerasan terhadap masyarakat terkait ekstraksi sumber daya alam.

Laju hilangnya hutan tropis global masih sangat tinggi sejak tahun 2018, dengan 3,7 juta ha wilayah hutan yang lenyap pada tahun 2023 saja, sehingga sekitar 2,4 gigaton karbon dioksida terlepas ke atmosfer. Jika tren saat ini terus berlanjut, artinya kawasan hutan tropis seluas Negara Guyana akan lenyap dalam 5 tahun ke depan pada tahun 2030, yang melepaskan emisi setara dengan tambahan emisi karbon Amerika Serikat selama 2,5 tahun dari seluruh sektor ekonominya.

Agribisnis -- termasuk daging sapi, kelapa sawit, dan kedelai -- serta penebangan untuk kayu dan kertas, merupakan faktor pendorong utama deforestasi hutan tropis dan merupakan sektor yang sangat terkait dengan pembunuhan para pembela hak atas lahan di seluruh dunia. Saat pertanian industri merambah hutan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal, serangkaian kerusakan sering kali terjadi. Para pembela lahan yang berada di garda depan semakin sering menghadapi intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan. LSM Global Witness melaporkan bahwa pada tahun 2023, 196 pembela lahan dibunuh karena berusaha melindungi wilayah mereka. Para pembela lahan yang juga merupakan masyarakat adat dibunuh secara tidak proporsional, yang jumlahnya lebih dari sepertiga total serangan mematikan yang terdokumentasikan sejak 2012.

Alih-alih menyikapi perannya yang berbahaya dalam melanggengkan krisis keanekaragaman hayati, sektor keuangan justru mempromosikan berbagai inisiatif yang sebagian besar hanya untuk kepentingan diri sendiri dan pada dasarnya cacat. Proposal-proposal ini mencakup berbagai upaya untuk membangun pasar kredit dan penyeimbangan (credit & offset) keanekaragaman hayati internasional, serta mengandalkan pelaporan mandiri perusahaan di bawah mekanisme Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Alam (TNFD). Skema-skema ini tidak akan melakukan apa pun untuk mengatasi akar permasalahan deforestasi dan pelanggaran hak, dan justru akan mengalihkan perhatian dari upaya untuk mendapatkan tanggung jawab sektor keuangan atas kerugian yang dibiayainya.

## Suara Hilang: 2106 pembela lahan dan lingkungan hidup terbunuh pada tahun 2012 hingga 2023 (SUMBER: GLOBAL WITNESS)



# Lima wilayah yurisdiksi utama yang diperlukan untuk menghentikan pembiayaan yang menyebabkan deforestasi

Forests & Finance melacak aliran keuangan dan investasi ke 300 produsen dan pedagang terkemuka dari enam komoditas yang merisikokan hutan yang bertanggung jawab atas deforestasi tropis di tiga wilayah hutan tropis, yaitu daging sapi, minyak sawit, pulp dan kertas, karet, kedelai, dan kayu. Metodologi ini melibatkan faktor penyesuaian geografis dan sektoral untuk menghubungkan pembiayaan secara konservatif agar tidak melebihi-lebihkan risiko hutan dalam setiap transaksi. Selain itu, transparansi di sektor keuangan masih sangat minim sehingga angka-angka yang kami peroleh sering kali lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Berdasarkan analisis terhadap data ini, kami mengidentifikasi lima wilayah yurisdiksi paling penting untuk mengatur pembiayaan komoditas yang merisikokan hutan agar selaras dengan target GBF. Kelima wilayah yurisdiksi tersebut adalah: Indonesia, Brasil, Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Untuk setiap wilayah yurisdiksi, kami mengidentifikasi jenis-jenis pembiayaan spesifik yang paling relevan dengan sektor komoditas yang merisikokan hutan.

## Bank-bank yang aktif di Indonesia dan Brasil

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia dan Brasil menyumbang 72% dari seluruh kredit yang diberikan pada enam komoditas yang merisikokan hutan, dengan nilai sebesar 285 miliar Dolar AS dalam 8 tahun terakhir. Bank-bank di Brasil menyumbang 48% dan bank-bank di Indonesia menyumbang 10%. Anak-anak perusahaan bank asing di Brasil dan Indonesia masing-masing menyumbang 9% dan 5%. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memperhatikan regulasi di kedua negara ini yang dapat memengaruhi kredit bank. Selain itu, produk investasi Brasil yang dijual kepada investor swasta yang membiayai agribisnis di Brasil memiliki nilai terutang total sebesar 187 miliar Dolar AS, dan karenanya regulasi di bidang ini juga penting.

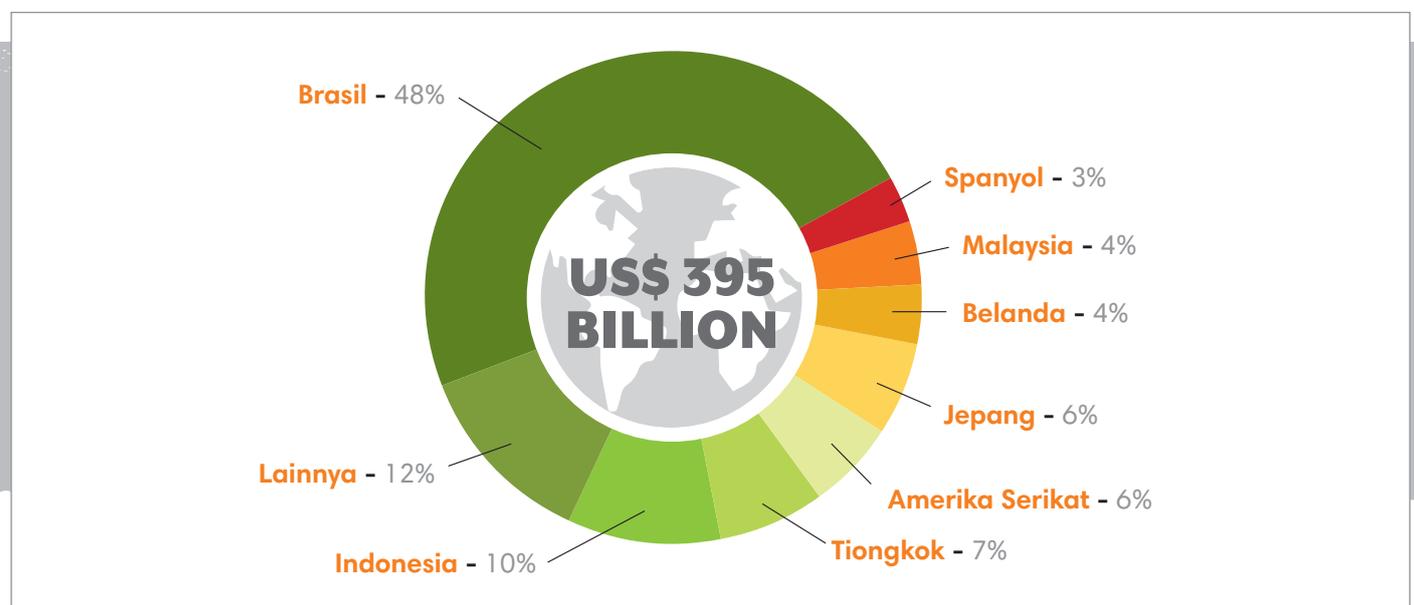
## Penerbitan obligasi dan saham di Tiongkok

Selain kredit bank, keenam komoditas yang merisikokan hutan tersebut juga didanai melalui penjualan saham dan obligasi kepada para investor. Bank-bank di Tiongkok memainkan peran penting dalam penerbitan penjaminan emisi saham dan obligasi oleh para pedagang dan produsen Tiongkok untuk komoditas yang merisikokan hutan, dengan nilai yang mencapai 18 miliar Dolar AS dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Oleh karena itu, regulasi Tiongkok terkait penerbitan saham dan obligasi bersifat penting.

## Investasi yang dikelola di UE dan AS

Pada Juli 2024, investor memegang 41 miliar Dolar AS dalam bentuk obligasi dan saham di perusahaan-perusahaan sektor komoditas yang merisikokan hutan. Sebanyak 37% berada di tangan investor Amerika Serikat dan 8% di tangan investor Uni Eropa. Dibandingkan dengan investor dari wilayah lain, investor Amerika Utara dan Uni Eropa memiliki portofolio investasi yang paling beragam pada investasi yang merisikokan hutan. Oleh karena itu, regulasi yang mewajibkan investor AS dan Uni Eropa untuk memengaruhi perusahaan-perusahaan tempatnya berinvestasi dapat menjadi signifikan.

## Kredit yang merisikokan hutan per negara berdasarkan penyandang dana, (2016-2024)



# Peran regulasi keuangan dalam GBF

Pada bulan Desember 2022, para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mengadopsi GBF Kunming-Montreal, yang menetapkan langkah ambisius untuk mencapai visi global yaitu dunia yang hidup harmonis bersama alam pada tahun 2050 (meskipun Amerika Serikat belum menandatangani perjanjian ini). Di antara elemen-elemen kunci GBF yakni 4 tujuan untuk tahun 2050 dan 23 target untuk tahun 2030. Laporan ini bertujuan untuk secara khusus membahas komitmen negara-negara terhadap target 14 GBF, yang mewajibkan negara mengintegrasikan keanekaragaman hayati secara penuh ke dalam regulasi sektor keuangan.

## **TARGET 14: Mengintegrasikan keanekaragaman hayati dalam pengambilan keputusan di setiap tingkat**

Menjamin integrasi penuh keanekaragaman hayati dan beragam nilainya ke dalam kebijakan, peraturan, proses perencanaan dan pembangunan, strategi pengentasan kemiskinan, pengkajian lingkungan hidup strategis, pengkajian dampak lingkungan dan, jika diperlukan, penghitungan nasional, di dalam dan di seluruh tingkat pemerintahan dan di semua sektor, khususnya kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati, secara progresif menyelaraskan semua kegiatan publik dan swasta yang relevan, serta arus fiskal dan keuangan dengan tujuan dan target kerangka kerja ini.

Dengan menggunakan Target 14 sebagai titik awal penelitian, para penulis laporan ini kemudian menyusun kerangka kerja penilaian indikatif untuk menguji bagaimana kondisi regulasi keuangan saat ini dalam memenuhi beberapa target penting GBF. Target lain yang dipilih untuk penilaian ini adalah Target 1: Merencanakan dan mengelola seluruh kawasan untuk mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati; Target 10: Meningkatkan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan di bidang pertanian, budidaya perairan, perikanan, dan kehutanan; dan Target 15: Dunia usaha menilai, mengungkapkan, dan mengurangi risiko dan dampak negatif terkait keanekaragaman hayati.

## **Jenis regulasi keuangan yang dinilai**

Laporan ini memiliki definisi yang luas mengenai 'regulasi keuangan', melampaui apa yang biasanya didefinisikan sebagai regulasi atau pengawasan keuangan. Definisi ini mencakup semua jenis undang-undang, peraturan, dan pedoman pemerintah yang berdampak pada bagaimana lembaga keuangan beroperasi, terutama dalam hal pembiayaan dan investasi pada perusahaan-perusahaan di perekonomian riil.

## **Jenis-jenis regulasi berikut ini dievaluasi:**

- » Manajemen risiko dan stabilitas keuangan
- » Fungsi pasar keuangan
- » Kebijakan moneter
- » Pencucian uang dan kejahatan keuangan
- » Pengungkapan informasi oleh perusahaan
- » Mendorong kegiatan yang berkelanjutan
- » Melindungi HAM dan/atau lingkungan hidup

# Temuan kunci dan penilaian indikatif

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan teratas dari temuan-temuan penilaian yang terperinci (selengkapnya dapat dilihat dalam laporan lengkap). Setiap wilayah yurisdiksi dievaluasi berdasarkan kombinasi unik dari kebijakan dan regulasinya yang relevan untuk mengatasi kredit dan investasi yang berkaitan dengan dampak keanekaragaman hayati dan hak-hak yang merugikan. Secara keseluruhan, hasilnya sangat memprihatinkan, dan ini mengindikasikan buruknya integrasi keanekaragaman hayati ke dalam peraturan dan pengawasan sektor keuangan secara keseluruhan.

Laporan ini menemukan bahwa Amerika Serikat memiliki kinerja paling buruk, dengan absennya pertimbangan keanekaragaman hayati yang berarti dalam regulasi sektor keuangannya. Indonesia dan Cina juga mendapat nilai yang buruk, meskipun keduanya menunjukkan beberapa referensi tentang keanekaragaman hayati. Brasil memiliki kinerja yang sedikit lebih baik, dengan adanya beberapa pembatasan terhadap pembiayaan perusahaan yang terlibat dalam perusakan keanekaragaman hayati. Uni Eropa mendapat skor sedikit lebih tinggi, dengan diadopsinya prinsip materialitas ganda dalam persyaratan pengungkapan informasi oleh investor. Namun demikian, Uni Eropa masih membebaskan sektor keuangan dari peraturan terkait keanekaragaman hayati lainnya, yang mencerminkan bahwa secara keseluruhan perlindungannya masih tidak memadai.

## Kerangka penilaian regulasi: Tabel penilaian

Skor warna	Penilaian
Merah	Regulasi keuangan tidak mengacu pada target GBF.
Jingga	Regulasi keuangan memang merujuk pada topik yang terkait dengan target GBF, tetapi hanya sebagai rekomendasi.
Kuning	Regulasi keuangan mengharuskan lembaga keuangan untuk mengambil langkah yang relevan terhadap target GBF.
Hijau	Regulasi keuangan mengharuskan lembaga keuangan untuk menyelaraskan semua keputusan pembiayaan dan investasi mereka dengan target GBF.



PHOTO: Paul Hilton / RAN

Kriteria penilaian	Penilaian Target 1:	Penilaian Target 10:	Penilaian Target 15:
(Sebagaimana didefinisikan oleh penulis untuk tujuan penelitian ini)	Regulasi keuangan tidak memperbolehkan pembiayaan atau investasi pada perusahaan yang terlibat dalam konversi bentang alam	Regulasi keuangan mengharap lembaga keuangan mendorong transisi yang adil di sektor Pertanian, Budidaya Perairan, Perikanan, dan Kehutanan yang mendukung hak-hak pekerja, petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal.	Regulasi keuangan mewajibkan transparansi semua aliran pembiayaan dan investasi dan pengungkapan penuh keanekaragaman hayati dan dampak sosial aliran tersebut.
<b>Regulasi Indonesia untuk bank</b>	Regulasi keuangan yang ada tidak membatasi pembiayaan atau investasi agar tidak terlibat dalam konversi bentang alam dengan cara apa pun.	Regulasi dan Taksonomi keuangan yang ada memang memberikan beberapa panduan mengenai isu-isu sosial dan lingkungan, tetapi tidak mencakup semua sektor yang relevan dan tidak bersifat wajib.	Regulasi keuangan yang ada memang mewajibkan bank untuk melakukan pelaporan LST, tetapi tidak menuntut transparansi aliran keuangan dan tidak berkewajiban melaporkan dampak sosial dan keanekaragaman hayati.
<b>Regulasi Brasil untuk bank dan produk investasi</b>	Ada pembatasan terkait konversi bentang alam untuk kredit pedesaan yang diawasi pemerintah, tetapi tidak untuk kredit bank biasa ataupun produk investasi (bebas pajak) yang menguntungkan sektor pertanian.	Lembaga keuangan yang ada diwajibkan untuk menjabarkan Kebijakan terkait Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan, dan Iklim, tetapi tidak secara eksplisit diharapkan untuk melakukan transisi yang adil di sektor-sektor yang relevan	Regulasi keuangan yang ada memang mewajibkan bank untuk melakukan pelaporan LST, tetapi tidak menuntut transparansi aliran keuangan (berdasarkan bank dan produk investasi) dan bank tidak berkewajiban melaporkan dampak sosial dan keanekaragaman hayati.
<b>Regulasi Cina terkait penerbitan saham dan obligasi</b>	Regulasi keuangan yang ada tidak membatasi penerbit sekuritas agar tidak aktif dalam proses konversi bentang alam dengan cara apa pun.	Penerbitan obligasi hijau, yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan transisi yang adil terhadap sektor-sektor terkait di Tiongkok, distimulasi. Akan tetapi, stimulasi ini tidak mencakup investasi asing atau obligasi perusahaan biasa.	Bursa saham telah menerbitkan panduan mengenai pengungkapan tentang dampak keanekaragaman hayati dan sosial, tetapi diharapkan persyaratan pelaporan dapat menjadi lebih ketat. Untuk saat ini, panduan ini hampir tidak mencakup dampak yang terjadi di luar negeri, dan juga tidak mensyaratkan transparansi mengenai di mana dana mereka diinvestasikan (kecuali untuk obligasi hijau).
<b>Regulasi Uni Eropa untuk para investor</b>	Regulasi keuangan yang ada tidak melarang investasi dalam konversi bentang alam dengan cara apa pun. EUDR saat ini belum meliputi pemodal dan SFDR menetapkan beberapa ekspektasi dalam hal ini, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada manajer pendanaan.	Regulasi keuangan yang ada mendorong lembaga keuangan untuk menstimulasi transisi yang adil di sektor-sektor terkait melalui kerangka kerja Taksonomi Uni Eropa dan Peraturan Obligasi Hijau terkait. Namun demikian, peraturan-peraturan ini tidak memiliki target khusus untuk sektor tertentu dan tidak mencakup kriteria sosial.	Dana investasi harus transparan tentang perusahaan tempatnya berinvestasi, tetapi tidak demikian halnya dengan dana pensiun dan investor lainnya. Regulasi Uni Eropa dan standar pelaporan ESRS mengharuskan pengungkapan dampak keanekaragaman hayati dan sosial akibat investasi. Namun demikian, ESRS masih belum memiliki standar sektoral dan tidak semua investor masuk dalam cakupannya.
<b>Regulasi Amerika Serikat untuk para investor</b>	Regulasi keuangan yang ada tidak melarang investasi pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konversi bentang alam.	Regulasi keuangan yang ada tidak mengharap agar lembaga-lembaga keuangan menstimulasi transisi yang adil di sektor-sektor terkait.	Regulasi keuangan memang mengharuskan investor untuk bersikap transparan tentang perusahaan tempatnya berinvestasi. Investor tidak diwajibkan untuk melaporkan dampak terhadap keanekaragaman hayati dan dampak sosial akibat investasinya.

# Rekomendasi kebijakan yang berfokus pada hasil

Reformasi mendasar sektor keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan GBF. Pemerintah harus memperbarui Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional dan Rencana Aksi (NBSAP) mereka agar memperkuat regulasi sektor keuangan untuk mendukung bank sentral, regulator keuangan, dan pengawas untuk memasukkan kriteria keanekaragaman hayati dan HAM sebagai inti dari mandat mereka. Berdasarkan penelitian dan penilaian yang disajikan, laporan ini memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap yurisdiksi yang dinilai dan menawarkan serangkaian rekomendasi yang relevan bagi semua negara. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dirangkum secara singkat di bawah ini (versi lengkapnya dapat dilihat dalam laporan lengkap):

**Manajemen risiko dan stabilitas keuangan:** Lembaga keuangan wajib mengintegrasikan risiko dan dampak keanekaragaman hayati dan HAM ke dalam proses manajemen risiko di tingkat grup perusahaan nasabah mereka. Mereka harus mengembangkan rencana transisi dengan target spesifik dan meminta pertanggungjawaban anggota dewan direksi atas manajemen risiko. Regulator harus memberikan mandat berupa cadangan modal yang lebih tinggi untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Uji stres di seluruh sistem juga harus mencakup pertimbangan keanekaragaman hayati.

**Fungsi pasar keuangan:** Regulasi harus mewajibkan pengungkapan portofolio investasi dan pinjaman secara berkala, termasuk paparan terhadap risiko dan dampak keanekaragaman hayati, dengan bukti yang dapat diverifikasi untuk klaim-klaim terkait keanekaragaman hayati. Produk keuangan harus diberi label berdasarkan dampak keberlanjutannya yang nyata, dan dana investasi yang berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati harus dihapuskan secara bertahap.

**Kebijakan moneter:** Bank sentral harus memprioritaskan obligasi dari penerbit yang memberikan kontribusi positif yang konkret dan dapat diverifikasi terhadap keanekaragaman hayati dan HAM dalam program pelonggaran kuantitatif dan kerangka jaminan. Bank ini harus menilai dan mengidentifikasi kontribusi portofolio investasinya sendiri terhadap dampak keanekaragaman hayati dan HAM. Mereka juga harus menawarkan penurunan suku bunga kepada lembaga keuangan yang berinvestasi pada kegiatan yang benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

**Pencucian uang dan kejahatan keuangan:** Risiko keanekaragaman hayati harus dimasukkan ke dalam proses uji tuntas dan proses Kenali Nasabah Anda (*Know your Customer*). Pembiayaan perusahaan harus dilarang jika perusahaan dan para pemasoknya tidak dapat menunjukkan kepatuhan yang jelas terhadap semua persyaratan hukum di wilayah operasionalnya. Lembaga keuangan harus bertanggung jawab atas kejahatan yang berkaitan dengan kelompok perusahaan yang dibiayainya, termasuk yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan HAM, dan harus bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan.

**Pengungkapan informasi oleh perusahaan:** Pelaporan publik tahunan mengenai risiko dan dampak keanekaragaman hayati dan HAM harus diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali bersama semua perusahaan menengah dan besar. Laporan ini harus mencakup data yang terperinci dan dapat diverifikasi mengenai dampak keanekaragaman hayati dan hak, termasuk data geolokasi operasinya. Semua perusahaan wajib menerbitkan laporan laba-rugi tahunan dan memberikan perincian mengenai sumber pendanaan dan (legalitas) aset-aset mereka.

**Mendorong kegiatan yang berkelanjutan:** Memperluas taksonomi dengan menyertakan kriteria keanekaragaman hayati, sosial, dan HAM dan mencantumkan kategori untuk sektor-sektor yang pada dasarnya berbahaya. Lembaga keuangan wajib menyelaraskan portofolio mereka. Menciptakan kriteria yang kuat, transparan, dan dapat diverifikasi bagi keuangan yang memberikan insentif terhadap pemanfaatan dan restorasi lahan berkelanjutan yang dipimpin oleh masyarakat.

**Perlindungan HAM dan lingkungan hidup:** Mengembangkan kewajiban uji tuntas bagi sektor keuangan untuk mencegah pembiayaan deforestasi tertanam (*embedded deforestation*), degradasi hutan, dan pelanggaran HAM. Membentuk mekanisme pengaduan dan tanggung jawab yang independen bagi masyarakat yang terkena dampak dan pihak ketiga untuk mengajukan pengaduan terhadap lembaga keuangan.

**Penguatan lembaga:** Regulator keuangan harus mengembangkan keahlian internal mengenai keanekaragaman hayati dan HAM dan membangun platform pemangku kepentingan yang inklusif untuk memediasi konsultasi dengan Masyarakat Adat, masyarakat sipil, dan para ahli lainnya. Regulasi keuangan yang berfokus pada hasil yang selaras dengan tujuan-tujuan GBF dan mengalihkan ekonomi dari kegiatan yang merugikan harus didukung dengan sistem sanksi yang kuat. Sistem ini harus mencakup hukuman yang tegas atas ketidakpatuhan dan adanya kewajiban untuk mendanai upaya mitigasi dan pemulihan bagi masyarakat dan ekosistem yang terkena dampak.